

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum, Cet. 12 Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya. 2016. *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Direktorat KPBU, 2021. *Panduan Teknis KPBU: Strategi Implementasi KPBU di Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hayati, Tri, dkk. 2005. *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD NRI*. Jakarta : Sekretaris Jendral MKRI dan CLGS FH UI.
- K. J, Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Terjemahan Anarullah dkk*. Jakarta: UI-Press.
- Marzuki, Peter M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Marzuki, Peter M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum. Cet 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, 1989, *Public Finance In Theory and Practice Fifth Edition*, Singapore: McGraw-Hill Book Company.
- Numantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pudyatmoko, Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Rawls John, 2019, *Teori Keadilan. Cet.3*, Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, Muhtar dan Muahamad Hasan Muaziz. 2020. *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.



- Solikin, Nur. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Syahril, Muh. Akbar Fhad. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

JURNAL

- Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin. "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 48. No. 2, Vol. 7. Januari 2018*.
- Effendi, Ahmad Zarkasi. "Bisnis Air: Komodifikasi, Privitasi, Dan Eksploitasi". *Program Sekolah Demokrasi Vol. 17. Malang, 2010*.
- Erani, Ahmad, Yustika. "Privatisasi Air: Resistensi terhadap Logika Pasar", *Jurnal PRISMA, No. 1 Tahun 2015*.
- Hamidah, Upik. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung". *Jurnal Cita Hukum. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 3 No. 2 Tahun 2015*.
- Khoirul, Anwar dan Lestari Linayati. "Analisis Tipe Kepemimpinan Direktur Operasional Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai PT. Adhya Tirta Batam (ATB)", *Jurnal Dimensi, Vol. 7, No. 1, Tahun 2018*.
- Pratiwi, Arindita. "Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Air Dalam Perspektif Investasi Dan Kesejahteraan." *Jurnal Dharmasisya. Vol. 2 No.1. Desember 2022*.
- Ridha, Lira Ayu, dkk. "Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam". *Jurnal Hukum Prima. Vol. 6 No. 1. Januari 2023*.



- Rifai, Bahtiar. *“Implementasi Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum Di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 22, No. 2, Tahun 2014.
- Saputra, Feri Lintang, dkk. *“Public-Private Partnership Pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat”*, Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 13, No. 2, Maret 2024.
- Setiady, Tri. *“Implikasi Utang Pajak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Wajib Pajak”*. Fiat Justitia Jurnal Hukum. Vol. 9 No.2. April-Juni 2015.
- United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR). *The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant). General Comment No. 15.* 20 Januari 2003.
- Wahyuni, Ridha. *“Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Dengan Warga Di Perumahan Sentul City)”*. Jurnal Unnes Law Review. Vol. 6, 4 Juni 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Provinsi Riau.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.



- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Kawasan Industri Pulau Batam.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD

UPT) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

WEBSITE

Air Batam Hilir, “*Di Masa Transisi, Moya Indonesia Dipercaya sebagai Caretaker Pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam*”, dalam https://hilir.airbatam.com/berita/di-masa-transisi-moya-indonesia-dipercaya-sebagai-caretaker-pada-sistem-penyediaan-air-minum-spam-batam?utm_source=chatgpt.com. Diakses 3 Juni 2025

BatamNow, “*Pembentukan BU SPAM di BP Batam Implementasi Langsung PP 41/2021*”, <https://batamnow.com/pembentukan-bu-spam-di-bp-batam-implementasi-langsung-pp-41-2021/>. Diakses 2 Juni 2025.

BLUD UPT PAB Dinas Cipta dan Tata Ruang Kota Batam, “*Profil BLUD UPT Kota Batam*”, dalam <https://blud-air.com/>. Diakses 4 Juni 2024.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, “*Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026*”, dalam <https://dcktr.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/92/2024/07/1.-RENSTRA-2021-2026-CKTR.pdf>. Diakses 4 Juni 2025.

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPi), “*Skema KPBU*”, dalam <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu>. Diakses tanggal 22 Juli 2025.

DJP, “*Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak*”, dalam <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>. Diakses 5 Juni 2025.



Fauziyah, Izura Ramadhani. Hak Atas Air Bersih sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam <https://www.diklatkerja.com/blog/hak-atas-air-bersih-sebagai-hak-asasi-manusia-di-indonesia>. Diakses 3 Juni 2025.

Nurmansyah, Daffa Yasril. “Memahami Konsep Pajak Air Permukaan Dalam UU HKPD”. <https://ortax.org/Memahami-Konsep-Pajak-Air-Permukaan-Dalam-Uu-Hkpd>. Diakses 1 Juni 2025.

Tribun Batam, “25 Tahun Kelola Air Bersih Di Kota Batam, Inilah Sejarah dan Perjalanan PT Adhya Tirta Batam”. <https://batam.tribunnews.com/2020/09/13/25-tahun-kelola-air-bersih-di-kota-batam-inilah-sejarah-dan-perjalanan-pt-adhya-tirta-batam>. Diakses 3 Juni 2025.

United Nation, Fact Sheet No.35: The Right To Water, United Nation Human Rights, 2010, 7-11. <https://www.ohchr.org/en/publications/factsheets/fact-sheet-no-35-right-water>. Diakses 03 Juni 2025.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504/B/PK/Pjk/2024 tanggal 14 Juni 2024.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 012240.99/PP/M.XB tanggal 22 Februari 2023.

LAIN-LAIN

Aswar, Andi. “Implikasi Hukum Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013”. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Tahun 2022.

Hamid, Chalid. 2009. *Hak-hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*. Disertasi. FH Universitas Indonesia.

Hidayah, Ida Rosyidatul. “Kewenangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor Dalam Pelayanan Air Minum Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor”, Tesis. Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. 2021.



Kotan, Garadin Mayela Jivisina. *“Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan Pertambangan sebagai Pemegang Kontrak Karya dengan Pemerintah”*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Surabaya. 2021.

Miyaso. 1997. *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Globalisasi*. Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi.